

**KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN
MORALSOSIAL**

Moh. Afiful Hair

Dosen Prodi PAI Fakultas TarbiyahUIM Pamekasan

E-Mail: Affkhir@gmail.com

Abstrak

Pendidikan sebagai instrument pemberdayaan masyarakat sejatinya memahami bahwa pendidikan moral bukan hanya semata menginginkan orang Indonesia kembali pada moralitas identitas jati dirinya, melainkan adanya reduksi maknayang terjadi dalam pelaksanaan proses. Pendidikan yang diberikan juga harus sedemikian rupa sehingga menekankan pada perubahan-perubahan sosial dan kecerdasan serta bersifat membebaskan. Porsi terbesar dari kegagalan dunia pendidikan terhadap kaum muda dewasa ini diakibatkan pendidikan ilmu-ilmu social yang hanya menjelaskan informasi hafalan dan tidak menyentuh kepada pembentukan watak, moralitas, sikap, atau prosesberpikirkirpesertadidik.

Kata kunci: Politik, Pendidikan, Perubahan Sosial.**Abstract**

Education as instument society improvement. Clearly understanding of moral education does not only want that Indonesian come to their own morality identity. But the reduction of meaning happen in their process. Education which given must effective in order to get the social change, cleverness and freedom. The biggest failed in education for teenager is caused socials education only implement to building character, morality, attitude or thinking process of students.

Keywords: politic, education, social change.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, "Sebuah upaya sadar", merupakan upaya pertama yang harus dilakukan institusi pendidikan. Upaya penyadaran yang dilakukan oleh institusi pendidikan bukanlah menyadarkan bahwa diri peserta didik bodoh dan perlu dicerdaskan, melainkan upaya penyadaran tentang eksistensi dirinya di dalam dirinya dan di dalam masyarakat dimana ia melakukan kegiatan sosial. Upaya menyadarkan eksistensi diri sendiri oleh pendidikan haruslah bersifat dasar pada diri individu tersebut, sedangkan upaya penyadaran eksistensi dirinya di dalam masyarakat adalah upaya yang dilakukan institusi pendidikan agar peserta didik mampu merefleksikan apa yang terjadi pada dirinya dengan masyarakat, permasalahan dirinya dengan masyarakat, permasalahan masyarakat dengan dirinya dan lebih luas lagi eksistensi dirinya sebagai seorang warga sebuah negara. Dengan demikian hanya frase "'upaya sadar'" tidak bisa lepas dari sebuah kegiatan politis, yaitu kegiatan yang memiliki kepentingan menyadarkan diri tentang eksistensi dirinya dan masyarakatnya.

Namun demikian, pendidikan hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan. Disinilah politik berperan dalam pendidikan, sebagai variabel bebas yang bisa dimanipulasi, pendidikan bisa digunakan untuk kepentingan apapun dalam ukuran baik atau buruk. Pendidikan dimata politik hanyalah alat untuk melanggengkan sistem dan alat rekonstruksi sistem. Sebagai contoh ketika elit politik menghendaki karakter orang Indonesia harus kembali pada jalurnya sebagai karakter yang ramah, santun dan jujur. Maka pendidikan sebagai alat pencapai tujuan menggarap kurikulum pendidikan karakter. Pendidikan sebagai upaya sadar seharusnya mengetahui bahwa pendidikan karakter bukan hanya semata menginginkan karakter orang Indonesia kembali pada jati dirinya, melainkan adanya reduksi makna yang terjadi dalam pelaksanaan proses. Orang berkarakter Indonesia disimbolkan dengan orang yang menggunakan pakaian rapi, licin, berkemeja dan bersepatu kinclong. Ini merupakan eksek yang terjadi ketika dalam pengajaran kurikulum yang terintegrasi dengan pendidikan karakter digarap asal-asalan. Sehingga pelaku pendidikan seperti pendidik-peserta didik mengalami pendangkalan

makna. Dari segi politik, bisa saja memang inilah yang dikehendaki oleh elit politik, menghegemoni budaya kaum elit. Kaum elit seringkali dianggap lebih tinggi derajatnya dan dianggap lebih santun ketimbang tukang becak dan kaum proletariat.

Maka sudah jelas kiranya pendidikan tidak boleh bebas nilai, karena akan sangat menguntungkan kaum yang sedang berkuasa pada saat itu, sebagai contoh kita seringkali mendapatkan perubahan kurikulum di setiap perubahan rezim yang berkuasa. Pendidikan haruslah bermuatan nilai yang dapat mengayomi masyarakat, pendidikan haruslah menjadi solusi bagi masyarakat sehingga terjadi perubahan struktur sosial menghapus kesenjangan yang dibuat ideologi liberal yang memisahkan antara pendidikan dan masyarakat, dan Indonesia bukanlah berideologi liberal namun berideologi Pancasila, yang didalamnya telah mencanangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian pendidikan pasti menghasilkan perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi hanya pada individu terdidik, tetapi juga dapat terjadi pada aras sosial. Pendidikan memberikan sumbangan pada perubahan sosial yang terjadi pada individu maupun masyarakat.

A. Politik Pendidikan

Kata Politik berasal dari bahasa Inggris, *Politics* yang berarti permainan politik.¹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik diartikan pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tatacara pemerintahan dan sebagainya, dan dapat berarti pula segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat dan sebagainya, mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.² Dalam bahasa Arab kata politik dikenal dengan istilah *siyasah* yang berarti cipta, upaya-upaya strategis dan pengaturan tentang sesuatu.³ Jadi dapat diapahami bahwa politik adalah sebuah tindakan, cara atau siasata, upaya strategis dan pengaturan tentang sesuatu.

Pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awal pen- dan akhiran -an, dan berarti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya mendidik, pengetahuan tentang mendidik, dan berarti pula pemeliharaan, latihan-latihan dan sebagainya yang meliputi badan, batin, dan sebagainya.⁴ Kata pendidikan dalam bahasa Yunani, dikenal dengan

¹ John M. Echols Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1980). hlm. 437.

² W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). hlm. 763.

³ Jamil Saliba, *Mujam al-falsafi* (Mesir: Dar al-Fikr, 1978). hlm. 45

⁴ W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 250.

paedagogos yang berarti menuntun anak. Dalam bahasa Romawi dikenal dengan *educare*, artinya membawa keluar, dalam bahasa Belanda menyebut istilah pendidikan dengan *opvoeden*, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *education* yang artinya menanamkan moral dan melatih intelektual.⁵ Dalam bahasa Arab kata pendidikan diwakili oleh kata *tarbiyah, ta'dib, ta'lim, tadrис, tadzkiyah, dan tadzkirah* yang secara keseluruhan menghimpun kegiatan yang terdapat dalam pendidikan yaitu membina, memelihara, mengajarkan, menyucikan jiwa dan mengingatkan manusia terhadap hal-hal yang baik.⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses mendidik, memelihari, menuntun, menanamkan moral dan melatih intelektual anak didik sehingga anak didik bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Dalam perkembangan sejarahnya politik pendidikan adalah penjelasan atau pemahaman umum yang ditentukan oleh penguasa pendidikan tertinggi untuk mengarahkan pemikiran dan menentukan tindakan dengan perangkat pendidikan dalam berbagai

kesamaan yang beraneka ragam beserta tujuan dan program untuk merealisasikannya.⁷ Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa politik pendidikan merupakan suatu proses, cara, upaya strategis dan pengaturan tentang penanaman moral dan peningkatan intelektual anak didik dengan tujuan bisa mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik.

Menurut Nata, ada lima unsur yang terkandung dalam politik pendidikan sebagai berikut:

1. Politik pendidikan mengandung kebijakan pemerintah suatu negara. Sebuah pemerintah Negara dalam berkomunikasi dengan rakyatnya biasanya menggunakan berbagai kebijakan. Kebijakan inilah yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh abdi Negara dan masyarakat sesuai dengan bidangnya termasuk pendidikan.
2. Politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundungan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan lainnya. Misalnya situasi dan kondisi sosial politik, budaya, keamanan dan hubungan pemerintah dengan dunia internasional. Meskipun kondisi tersebut tidak berkaitan secara langsung akan tetapi cukup berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan suatu Negara.
3. Politik pendidikan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan karena pemerintah memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang lebih kuat dalam

⁵ Noeng Muhamadji, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993). hlm. 15.

⁶ Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). hlm. 9.

⁷ Ibid.

- memikul tugas dan tanggung jawab terselenggaranya pendidikan, walaupun swasta juga ikut berperan di dalamnya.
4. Politik pendidikan dijalankan demi tercapainya tujuan Negara.
 5. Politik pendidikan merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan suatu negara.⁸

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa unsur yang terkandung dalam politik pendidikan mengandung kebijakan suatu negara dan juga peraturan perundangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan demi tercapainya tujuan negara. Hal ini perlu dilakukan karena politik pendidikan merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dalam suatu negara.

B. Moral dan Perubahan Sosial

Kata moral berasal dari kata *Mores* dalam bahasa Latin. *Mores* sendiri berasal dari kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Sjarkawi menyatakan moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia. Kebaikan moral mengandung nilai-nilai yang universal tentang kemanusiaan.⁹

⁸ Ibid. 9-11.

⁹ Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). hlm. 15.

Turiel menyatakan ada perbedaan antara moralitas dan konvensi sosial bagi anak. Menurutnya perilaku moral, seperti memukul seseorang tanpa alasan, memiliki efek intrinsik (misalnya kejahatan) terhadap kesejahteraan orang lain. Inti dari ciri kognisi moral berpusat pada pertimbangan terhadap efek perilaku tertentu terhadap kesejahteraan orang lain. Konvensi sosial tidak memiliki konsekuensi interpersonal. Misalnya ketika memberi panggilan "profesor" atau bapak atau ibu kepada guru atau menggunakan nama mereka. Konvensi sosial hanya berkaitan dengan koordinasi sejumlah perilaku yang memperlancar fungsi sosial kelompok tertentu.¹⁰ Perbuatan-perbuatan bermoral adalah perbuatan-perbuatan terpuji.¹¹ Durkheim menyatakan bahwa moralitas akan mencegah individu agar tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Disiplin moral tidak diciptakan untuk kepentinganNya tetapi untuk kepentingan manusia.¹²

¹⁰ Elliot Turiel, *Domain Theory: Distinguishing Morality and Convention* (<http://tigger.uci.edu/~Inucci>) yang diakses pada tanggal 01 Maret 2018 jam 20.45 WIB.

¹¹ Jamaal, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, Terjemahan Bahrun Abubakar Ihsan Zakaria, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005). hlm. 25

¹² Emile Durkheim, *Pendidikan Moral: Suatu Studi dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, Terjemahan Lukas Ginting (Jakarta: Erlangga, 1990). hlm. 53.

james rachels menggambarkan suatu konsep minimum tentang moralitras yang merupakan suatu usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal-yaitu untuk melakukan hal yang baik menurut akal, seraya memeberi bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang akan terkena tindakan itu. sehingga penekanan yang dilakukan oleh Rachels pada fungsi akal untuk menentukan segala tindakan yang dilakukan bermoral atau tidak.¹³

Selaras dengan itu Frans Magnis Suseno dalam Adiningsih menyatakan bahwa moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Dalam hal ini moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya. Norma-norma moral adalah tolok ukur yang digunakan manusia untuk mengukur kebaikan seseorang.¹⁴

Sedangkan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat perubahan sosial dapat terjadi sebagai hasil faktor-faktor ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang

diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik.¹⁵

Berikut ini, beberapa teori mengenai perubahan sosial yang dapat menjadi kerangka acuan:

a. Teori evolusioner (Evolusi Budaya), Ada dua tipe teori evolusi mengenai cara masyarakat berubah, yaitu: unilinear dan multilinear. Teori unilinear mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Setiap masyarakat berasal dari bentuk yang lebih sederhana ke bentuk yang lebih kompleks, dan masing-masing melewati proses perkembangan yang seragam. Sedangkan teoretikus multilinear tidak mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti urutan yang sama, melainkan masing-masing mempunyai jalur yang berbeda mengarah pada tahapan perkembangan yang sama. Jadi teori evolusi baik yang unilinear maupun multilinear, ialah asumsi mengenai kemajuan budaya.¹⁶

b. *Teori siklus*, Teori siklus mengasumsikan bahwa peradaban adalah laksana organism: peradaban dilahirkan, menjalani masa muda yang

¹³ Mohammad Muchlis Sholihin, *Akhlaq & Tasawuf : dalam Wacana Kontemporer* (Surabaya : Pena Salsabila), hlm. 23.

¹⁴ Ibid. 24.

¹⁵ Emile Durkheim, *Pendidikan Moral: Suatu Studi dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, hlm. 55.

¹⁶ James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi* (Jakarta: Erlangga, 2006) hlm. 221.

mencapai usia lanjut, dan akhirnya mati. Masyarakat itu berputar melewati tahap-tahap yang berbeda dan tahap-tahap tersebut lebih bersifat berulang daripada bergerak.

c. *Teori keseimbangan*, Menurut teori ini masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain, di mana masing-masing bagian itu membantu keefektifan masyarakat, sehingga jika terjadi perubahan sosial yang mengganggu salah satu dari bagian tersebut yang kemudian menggoyahkan masyarakat, maka akan terjadi dalam bidang-bidang lain masyarakat. Hal itu akan mengembalikan masyarakat ke dalam kedudukan yang harmonis dan lahirlah keseimbangan.

d. *Teori konflik*, Pada psikolog yang menganut paham ini memandang masyarakat sebagai *mass of group* yang selalu berselisih satu sama lain. Karena kelompok-kelompok ini bersaing untuk memperoleh barang-barang dan sumber daya yang ada, maka terjadilah perubahan perubahan sosial. Dan berhubungan dengan kelompok-kelompok yang beroposisi selalu berusaha untuk mengubah keadaan maka terjadilah diorganisasi dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Keserasian atau harmoni dalam

masyarakat (*social equilibrium*) merupakan keadaan yang diidam-idamkan setiap masyarakat.

Dengan keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar benar berfungsi dan saling mengisi. Dalam keadaan demikian, individu secara psikologis merasakan adanya ketenteraman, karena tidak adanya pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai. Setiap kali terjadi gangguan terhadap keadaan keserasian, maka masyarakat dapat menolaknya atau mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatannya dengan maksud menerima unsur yang baru. Akan tetapi, kadang kala unsur baru dipaksakan masuknya oleh suatu kekuatan. Apabila masyarakat tidak dapat menolaknya karena unsur baru tersebut tidak menimbulkan kegoncangan, pengaruhnya tetap ada, akan tetapi sifatnya dangkal dan hanya terbatas pada bentuk luarnya. Norma-norma dan nilai-nilai sosial tidak akan terpengaruh olehnya dan dapat berfungsi secara wajar.¹⁷

Perubahan sosial mengakibatkan terjadinya masalah-masalah sosial seperti kejahatan, atau kenakalan remaja. Meskipun begitu, tidak setiap

¹⁷ Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). hlm. 44-45.

masalah yang terjadi pada masyarakat disebut masalah sosial.

C. Relasi kebijakan Politik Pendidikan dan moral sosial

yang dimaksud dengan kebijakan politik pendidikan dalam mengurai permasalahan social adalah berkaitan dengan kekuatan dari penguasa pembuat kebijakan di bidang pendidikan dalam rangka untuk mengubah struktur dan fungsi masyarakat serta upaya memecahkan permasalahannya.

Pendidikan selalu sepihak, pendidikan yang diberikan oleh pendidik selalu berdasarkan keinginan pola penguasa yang menetapkan kurikulum. Dan karenanya politik ternyata sangat berkait erat dengan pendidikan. Politik adalah kebijakan. Siapa yang menguasai politik atau siapa yang menjadi pemimpin dialah yang kemudian menentukan arah pendidikan. Hal seperti ini bisa membawa ke dua hal positif dan negatif

Karena bahaya-bahaya tersebut Ivan Illich menggambarkan bahwa pendidikan formal justru harus ditolak. Peningkatan ilmu harus dikaitkan dengan keberhasilan. Imagination murid

dilatih untuk menerima jasa bukan nilai.¹⁸

Pelembagaan ternyata akan mengakibatkan polusi fisik, polarisasi sosial dan impotensi psikologis. Degradasi nilai ini ternyata semakin dipercepat ketika orang menganggap kebutuhan non material itu sebagai suatu komoditi. Karena itu sistem pendidikan formal harus ditolak.¹⁹

Politik modern telah selalu melupakan perannya sebagai pendidik, karena adanya gambaran "jasa" tersebut. Pendidikan hanya dipandang sebagai sebuah tujuan dan bukan proses belajar. Karenanya perubahan sosial yang seharusnya dibawa dalam pendidikan dilupakan. Semua tergantung apabila ternyata pemerintah yang menetapkan kebijakan pendidikan adalah sebuah pemerintahan yang baik, yang serius ingin memajukan pendidikan di negaranya, maka dunia pendidikan di Negara tersebut akan maju. Sebaliknya, apabila pemerintah yang menetapkan kebijakan politik pendidikan adalah pemerintahan yang kurang peduli terhadap pendidikan, bahkan cenderung ingin menguasai pendidikan tersebut, maka politik pendidikannya akan menjadi sangat subyektif. Sebagai

¹⁸ [Ivan Illich. Bebas Dari Sekolah \(Jakarta: Sinar Harapan, 1982\).](#) hlm. 11.

¹⁹ Ibid. 40.

sebuah contoh pelajaran sejarah adalah sebuah pelajaran yang sangat rentan terhadap manipulasi pendidikan. Sejarah bisa saja ditulis berdasarkan pemenang sejarah, dan bukan berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi.

Secara negatif, pendidikan bisa dipandang sebagai perpanjangan tangan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya karena mereka memberikan pendidikan berdasarkan apa yang mereka suka dan inginkan agar kelanggengan kekuasaan mereka tetap terjaga. Politik pendidikan yang dibawa oleh pemerintahan yang cenderung memandang pendidikan sebagai sebuah perpanjangan tangan penguasa akan menjadi sebuah politik pendidikan yang sepihak, berdasarkan apa yang ingin diberikan oleh penguasa.

Sebaliknya, apabila kita memandang politik pendidikan secara positif, di mana pemerintah yang menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut adalah benar-benar serius terhadap perubahan sosial, maka politik pendidikan yang dibawa akan memberikan sebuah perubahan sosial yang positif. Masyarakat akan bisa dididik melalui pendidikan yang ditetapkan oleh politik pendidikan sebuah pemerintahan tertentu.

Pendidikan yang diberikan juga harus sedemikian rupa sehingga tidak menekankan pada perubahan-perubahan sosial dan kecerdasan. Pendidikan yang negatif cenderung selalu menguntungkan kaum yang kuat. Padahal semestinya pendidikan itu bersifat membebaskan.

Penutup

Politik dan pendidikan pada dasarnya saling melengkapi. Pendidikan politik yang benar akan membawa sebuah politik pendidikan yang baik pula. Tidak dapat disangkal bahwa perubahan yang dibawa politik pendidikan tersebut dapat berjalan menuju dua arah, ke arah yang terikat tangan penguasa, atau ke arah yang lebih membebaskan.

Indonesia adalah sebuah contoh negara yang selama ini rakyatnya terbelenggu oleh pendidikan yang disajikan oleh penguasa, sehingga pemikiran menjadi sangat sempit. Pendidikan yang seharusnya membebaskan tersebut, telah dipakai sebagai alat melanggengkan kekuasaan, sehingga hanya membawa sebuah kesenjangan sosial yang semakin lebar antara mereka yang mampu dan mereka yang tidak mampu. Bagi yang mampu membiayai pendidikannya tentu akan

memilih pendidikan yang baik, sehingga nantinya dia juga akan mendapatkan penghasilan yang tinggi karena pendidikannya tersebut. Orangtua juga jangan melepaskan tanggungjawabnya sebagai pendidik yang utama. Sekolah hanyalah rekan orangtua dalam memberikan pendidikan, bukan sebagai satu-satunya pendidik sebagai solusi terhadap permasalahan politik pendidikan dan perubahan sosial adalah menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada warga Negara melalui pendidikan.

Pendidikan di Indonesia selama ini lebih sering dianggap sebagai sebuah batu loncatan bagi narasi ekonomi yang sudah ada di benak naradidik. Pendidikan yang setinggi-tingginya diperoleh hanya untuk mendapatkan gelar bagi pencapaian taraf ekonomi yang lebih baik. Praktek penjualan gelar mampu melihat pangsa pasar yang sangat menjanjikan di Indonesia akibat pola pikir yang demikian. Sedikit sekali nilai-nilai yang diajarkan di Indonesia, karena pola pendidikan di Indonesia berangkat dari ketakutan naradidik dan trauma terhadap pendidik. Hal ini membawa perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Itu semua harus dirubah apabila Indonesia ingin memperoleh perubahan sosial ke arah yang baik.

Pendidikan jangan diberangkatkan dari ketakutan, dan jangan menjadikan pendidikan formal sebagai satu-satunya sarana pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Durkheim, Emile. *Pendidikan Moral: Suatu Studi dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*. Terjemahan Lukas Ginting. Jakarta: Erlangga. 1990.
- Elliot Turiel. *Domain Theory: Distinguishing Morality and Convention* (<http://tigger.uic.edu/~Inucci>). <http://belajarsikologi.com/makala-dampak-perubahan-sosial/>.
- Henslin, James M. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Ilahi, Wahyu. *Komunikasi Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Illich, Ivan. *Bebas Dari Sekolah*. Jakarta: Sinar Harapan. 1982.
- Jamaal. *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*. Terjemahan Bahrun Abubakar Ihsan Zakaria. Bandung: Irsyad Baitus Salam. 2005.
- Muhadjir, Noeng. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1993.
- Nata, Abudin. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Poerdarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Saliba, Jamil. *Mu'jam al-falsafi*. Mesir: Dar al-Fikr. 1978.
- Shadily, John M. Echols. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1980.
- Sjarkawi. *Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.